

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA RPJMD KABUPATEN KETAPANG

Eliyanti

b2052211015@student.untan.ac.id

ABSTRACT

In implementing the regional income and expenditure budget, the motivation for the RPJMD targets will be used as a guide, namely the targets for the achievements of the Key Performance Indicators (IKU) of Ketapang Regency for 2016 – 2020, because these reports can be used as benchmarks in assessing the success of development quantitatively and qualitatively, which has been carried out in the past 5 periods. The purpose of this study was to determine the evaluation of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in reporting the performance targets of the Ketapang Regency RPJMD. The method used in this study is a field research method for BAPPEDA and BPKAD Ketapang Regency and a quantitative research method to describe financial data in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports and explain the financial data to be analyzed. Data collection was obtained from interviews, observation and documentation. The results of this study are (1) According to the achievement of the output of the implementation of the APBD in achieving the RPJMD target in the 2016-2020 period, expenditure realization data, in the last five years, there has been relatively improved growth in expenditure growth in Ketapang Regency; (2) The results obtained from the implementation of the APBD have not been optimal because the TPAK in Ketapang Regency still shows a fluctuating trend and tends to decrease and the high number of stimuli in Ketapang Regency is the biggest factor affecting the implementation of the APBD 3. Findings from the results of the APBD evaluation in achieving the Ketapang Regency RPJMD targets there is still a great deal of dependence on transfer revenue from the central government, this is because the Ketapang Regency APBD in terms of regional spending is still relatively low.

Keywords: Performance Targets, RPJMD, Revenue Budget, Regional Expenditures.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. BAPPEDA Kabupaten Ketapang merupakan perangkat daerah yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah atau perencanaan pembangunan pemerintahan yang telah dibuat, sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan Kabupaten Ketapang. BAPPEDA dan BPKAD Kabupaten Ketapang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah tanggung jawab Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten

Ketapang. Didalam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem NKRI dengan mengefektif dan mengefesiansikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah serta peluang dan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. (Moeheriono 2012), menjelaskan kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Setiap daerah diberi wewenang untuk melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengingat saat ini penyusunan APBD sudah menjadi hak sepenuhnya bagi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut di atur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, kewenangan lain yang diberikan kepada setiap daerah berupa penggunaan anggaran. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategi yang telah selesai dilakukan. Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Realiasi Anggaran (LRA) APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2016 – 2020. Dari data realisasi pelaksanaan anggaran diatas

jumlah belanja dan transfer pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 menunjukkan: Jumlah penyerapan anggaran ditahun 2016 sebesar Rp. 1.953.673.45 dari pagu anggaran dengan persentase 94.34%, penyerapan anggaran ditahun 2017 sebesar Rp. 1.993.617.87 dari pagu anggaran dengan persentase sebesar 95.94%, kemudian ditahun selanjutnya 2018 diserap sebesar Rp. 2.118.372.56 dari pagu anggaran dengan persentase 95.84%, dipada tahun anggaran 2019 jumlah penyerapan anggaran diperoleh sebesar Rp. 2.348.730.05 dari pagu anggaran dengan persentase 94.86%, dan di tahun 2020 diperoleh dana sebesar Rp. 2.144.283.04 dari pagu anggaran dengan persentase 94.99%, data yang di tunjukan diatas menunjukkan porsi belanja mengalami naik turun atau fluktuatif begitu juga dengan nilai persentase nilai belanjanya.

Tujuan Indikator Kinerja Daerah yaitu memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada akhir periode masa jabatan sehingga indikator kinerja daerah bisa disebut sebagai IKU bagi Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ketapang Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2016-2020. Dari indikator kinerja utama Kabupaten Ketapang, menunjukkan bahwa semua indikator kinerja pada tahun 2016 persentase realisasi untuk ditahun berikutnya sampai tahun 2020 dalam realisasinya menunjukkan penurunan capaian target. Dari sekian banyak indikator kinerja utama Kabupaten Ketapang fokus permasalahan yang tertuju dalam mengungkap efektifitas tingkat pengangguran terbuka. Angka peningkatan dan pengurangan di tahun tersebut seluruh angka tersebut menunjukkan kriteria sangat tidak efisien dalam penyelenggaraannya, jadi bisa disimpulkan fokus masalah yang akan di ulas dalam mengetahui pelaksanaan APBD dalam pencapaian target kinerja RPJMD, indikator kinerja pembangunan daerah persentase realisasinya menurun atau tidak tercapai.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ketapang target dan capaian untuk Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020. Dari Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2016 realisasinya sebesar 4,29 melebihi target 4,45 yang di rencanakan oleh pemerintah, begitu pula di tahun

2017 target yang di rencanakan sebesar 4,29 realisasi mencapai 3,97 indikator TPT melebihi target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, di tahun 2018 target yang di rencanakan oleh pemerintah sebesar 3,70 melebihi target realisasi sebesar 3,23, di selanjutnya mengalami perubahan yang dari beberapa tahun kebelakang melebihi target di tahun 2019 dengan realisasi sebesar TPT 3,50 dengan realisasi 4,53, dan di tahun 2020 TPT menunjukkan target sebesar 3,50 dengan realisasi sebesar 7,30 menunjukkan angka paling tertinggi realisasi TPT dalam kurun waktu 5 priode, semakin besar realisasinya semakin menunjukkan tingginya TPT yang ada di Kabupaten Ketapang, di tahun terakhir 2020 mencapai angka tertinggi di sebabkan oleh adanya refocusing anggaran yang memusatkan anggaran pada anggaran kesehatan dan bantuan sosial, dikarenakan di tahun 2020 wabah covid sedang meningkat sehingga anggaran banyak di alihkan untuk kesehatan masyarakat yang terkena dampak covid 19.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prihandini et al. 2021) Tingkat efektifitas dipengaruhi oleh realisasi anggaran dari beberapa program kerja yang ada di BAPPEDA Litbang Kota Palembang. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Filip Hruza (2015) dengan meningkatnya volume sumber daya keuangan, informasi keuangan dan semakin kompleksnya hubungan keuangan dalam perekonomian nasional, permintaan akan alat analisis keuangan akan semakin meningkat. Hasil penelitian berpengaruh perubahan SKPD menurut responden perubahan SKPD bisa saja menyebabkan keterlambatan penyusunan APBD, akan tetapi pada penelitian yang diambil ini meskipun memiliki keterkaitan seperti halnya ada kesalahnya perhitungan SKPD namun tidak menghambat penyusunan APBD Komang (2019). Karena jika terjadi kesalahan perhitungan, masih bisa diatasi dengan menghitung ulang. Matondang (2022) mengungkapkan Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintahan kecamatan dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah, tingkat efektivitas anggaran dan belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Didukung oleh hasil penelitian untuk kinerja belanja daerah dari sisi varians belanja, pertumbuhan

belanja dan keserasian belanja dikatakan baik dan serasi atau seimbang dalam mengalokasikan belanja daerah karena alokasi belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Sedangkan tingkat rata-rata efisiensi belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2016–2020 sebesar 93% yang tergolong cukup efisien Hanifa (2021).

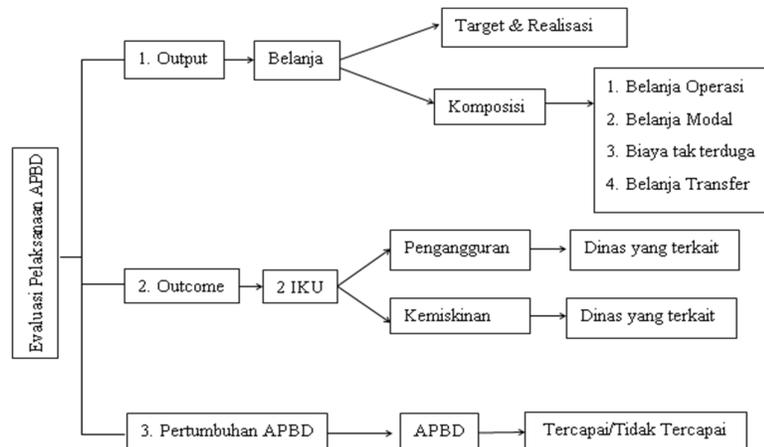
Dari uraian di atas terlihat bahwa anggaran memegang peranan penting sebagai alat perencanaan dan pengawasan. Untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang capaian output, capaian outcome dan target pertumbuhan APBD perlu adanya evaluasi kinerja untuk prioritas pembangunan daerah. Evaluasi kinerja adalah kegiatan penilaian yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan (berupa barang, jasa) dan hasil (outcome) program pembangunan (berupa dampak dan manfaat). Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Pencapaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Ketapang”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam APBD yang menggambarkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan Otonomi daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan pemerataan dan keadilan yang mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang maksimal. Setiap tahun Kabupaten Ketapang melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya APBD dari

tahun ke tahun dijadikan pembuktian apakah indikator kinerja Pemerintah daerah sudah mencapai target yang diinginkan atau belum.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah daerah harus mampu untuk mengambil arah kebijakan keuangan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terselenggara dengan baik, cermat dan akurat.



Gambar 1. Evaluasi Pelaksanaan APBD

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif untuk mendeskripsikan data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang dan menjelaskan data keuangan tersebut untuk menganalisis data keuangan yang dapat memberikan gambaran yang jelas untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat historis, yakni Capaian output, Capaian outcome, Target pertumbuhan APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016–2020. Selanjutnya mengumpulkan data dengan cara wawancara dan melihat laporan realisasi anggaran tahun 2016-2020 yang didapatkan dari BPKAD Kabupaten Ketapang dan laporan capaian target IKU yang menjadi Indikator Makro Pembangunan Daerah di Bappeda Kabupaten Ketapang.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1. Wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang mengenai prosedur penyusunan APBD dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Ketapang. 2. Wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan Kepala BAPPEDA Kabupaten Ketapang mengenai pengelolaan keuangan dalam merealisasikan RPJMD Kabupaten Ketapang mengenai capaian kinerja, potensi dan permasalahan yang akan diungkap. 3. Dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan APBD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari BPKAD dan Laporan IKU pada Indikator Makro Pembangunan daerah dari BAPPEDA dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Ketapang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus efektivitas yang diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Mardiasmo 2013).

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Output Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang



Sumber: LRA Kab Ketapang Tahun 2016-2020

Gambar 2. Laporan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ketapang

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat laporan realisasi anggaran Kabupaten Ketapang pada tahun 2016-2020 dengan jumlah belanja keseluruhan pada tahun 2016 dengan jumlah belanja 94.34 %, ditahun 2017 mengalami peningkatan jumlah belanja sebesar 95,94 %, untuk tahun 2018 jumlah belanja mengalami penurunan sebesar 95,84%, ditahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 94,88% dan di tahun 2020 belanja mengalami menjadi 94,99% mengalami peningkatan di banding tahun 2019. Penurunan yang besar terjadi pada tahun 2019-2020 diakibatkan oleh menyebarnya pandemi covid-19 yang masuk ke Kabupaten Ketapang. Berikut untuk melihat kriteria persentase belanja daerah Kabupaten Ketapang dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Tingkat Efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020

Tahun	Analisis Efektivitas	Kriteria
2016	94,34 %	Efektif
2017	95,94 %	Efektif
2018	95,84 %	Efektif
2019	94,86 %	Efektif
2020	94,99 %	Efektif

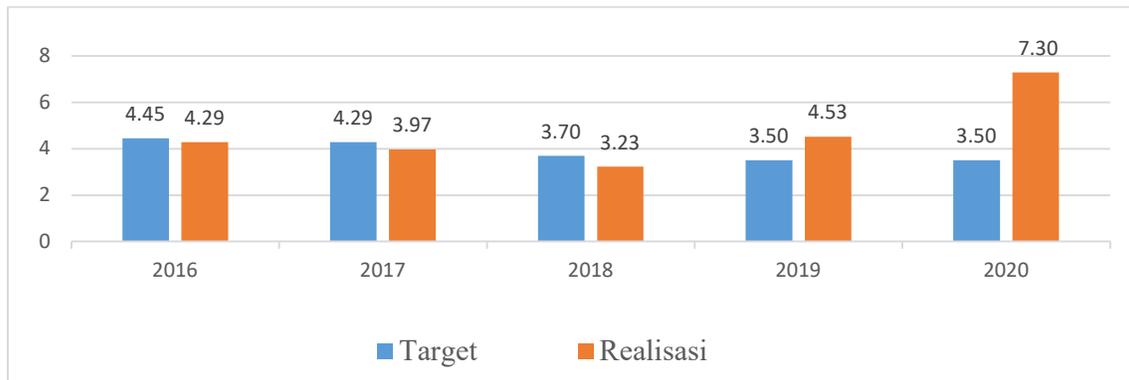
Sumber: LRA Kab Ketapang Tahun 2016-2020

Berdasarkan table diatas dapat dilihat tingkat efektivitas realisasi belanja pada tahun 2016 dengan persentasi 94,34% menunjukkan keefektifan belanja di tahun tersebut, di tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 95,94% dengan kriteria efektif, ditahun 2018 mengalami penurunan yang sedikit sekitar 95,84% dengan kriteria efektif, memasuki di tahun 2019 kembali menunjukkan penurunan dalam realisasi belanja dengan persentase sebesar 94,86% kriteria efektif dan di tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan presentase 94,99% masih dalam kriteria efektif. Dapat disimpulkan efektifitas belanja Kabupaten Ketapang dari tahun 2016-2020 cukup signifikan dengan kriteria efektif setiap tahunnya dengan raalisasi belanja yang fluktuatif.

Outcome Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang

Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2016-2020 yakni indikator tingkat pengangguran terbuka pada gambar diagram 2 dan tingkat kemiskinan pada gambar diagram 3 dengan melihat target dan realisasi pertahun

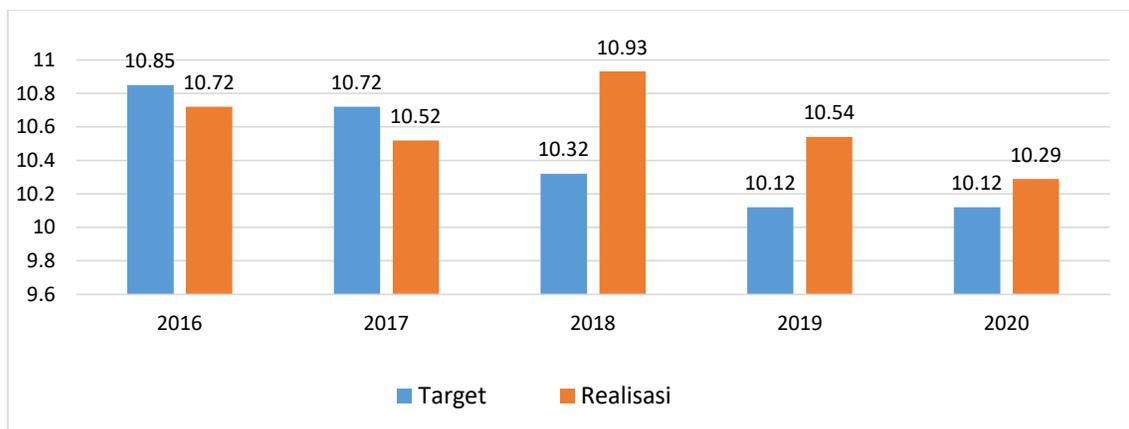
yang peneliti dapatkan dari RKPD Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020

Gambar 3. TPT Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020 (%)

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016-2018 realisainya cukup baik yakni melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Ketapang, namun memasuki tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang cukup tajam sehingga tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.



Sumber: Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016-2020

Gambar 4. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020 (%)

Berdasarkan grafik diatas tingkat kemiskinan, pada tahun 2016-2018 perekonomian Kabupaten Ketapang masih cukup baik sehingga pencapaian target realisasi kinerja pada indikator tingkat pengguran terbuka sangat baik, dikarenakan realisainya melebihi target namun memasuki tahun 2019-2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan yang sangat drastis dengan kategori tidak mencapai target. Untuk tingkat kemiskinan di tahun

2016 realisasinya tidak mencapai target, namun ditahun 2017 ada penurunan yang sangat pesat dengan realisasi melebihi target. Pada tahun 2018-2020 kembali lagi terjadi kenaikan sehingga target kembali tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dialami oleh setiap lapangan usaha dalam menghadapi keadaan pendapatan setiap tempat usaha mengalami penurunan omset karena perkembangan covid-19 yang menyebabkan banyak karyawan di PHK secara masal menyebabkan kemiskinan yang terjadi semakin tinggi di tahun tersebut.

Hasil Realisasi Belanja Terhadap IKU (Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan) Kabupaten Ketapang tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Evaluasi Realisasi Belanja Terhadap IKU (Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Analisis efektifitas		TPT	Kemiskinan
		Belanja	%	%	%
1	2016	1.951.143,20	94,34	4,29	10,72
2	2017	1.993.617,87	95,94	3,97	10,52
3	2018	2.118.372,56	95,84	3,23	10,93
4	2019	2.348.730,05	94,86	4,53	10,54
5	2020	2.144.283,04	94,99	7,30	10,29

Sumber. Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas persentase belanja dari tahun 2016-2020 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2016 belanja daerah Kabupaten Ketapang, tumbuh sebesar 94,34% dengan capaian TPT sebesar 4,29% dan kemiskinan sebesar 10.72%, ditahun 2017 persentase belanja mengalami peningkatan menjadi 95,94% dengan kategori efektif dalam capaian IKU, ditahun ini persentase TPT yaitu 3,97% menunjukkan penurunan dan kemiskinan sebesar 10,52%, ditahun 2018 belanja kembali menunjukkan angka kenaikan sebesar 95,84% sedangkan TPT Kembali menurun sebesar 3,23% dan kemiskinan sebesar 10,93%, tahun 2019 pertumbuhan persentase belanja masih baik meski menurun dari persentase belanja ditahun sebelumnya, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya kebijakan refofusing anggaran yang dilakukan pemerintah sehingga IKU tidak tercapai. Pada tahun 2020 realisasi belanja menunjukkan angka penurunan disebabkan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang kian memburuk dan wabah covid-19 salah satunya yang mengakibatkan TPT naik tajam. Efek negatif dari keadaan

tersebut dirasakan oleh pemilik usaha dan para karyawan (pekerja), banyak pemberhentian karyawan (PHK) dan pemilik usaha menutup usaha mereka dikarenakan kondisi ini ekonomi masyarakat keadaan tersebut membuat angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Ketapang semakin turun, namun berdasarkan pantauan dari tabel 3 perekonomian masyarakat di kabupaten Ketapang masih bisa bertahan diwaktu tersebut karena masyarakat masih memiliki tabungan/aset yang dapat digunakan dalam bertahan dimasa krisis tersebut. Selain aset/tabungan banyak juga masyarakat yang beralih profesi dari pekerjaan awal mereka demi bertahan pada saat tersebut.

Indikator kinerja pembangunan daerah dari tahun 2016-2020 berpengaruh belanja terhadap tingkat pengangguran terbuka di tahun 2016 belanja sebesar 94,34% TPT sebesar 4,29%, di tahun berikutnya 2017 belanja daerah meningkat 95,94% TPT menurun sebesar 3,97%, di tahun 2018 belanja sedikit mengalami penurunan sebesar 95,84% dan TPT ikut menurun sebesar 3,23, di tahun 2019 belanja daerah mengalami penurunan sebesar 94,86 akan tetapi TPT meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,53%, dan di tahun 2020 belanja daerah sedikit mengalami peningkatan sebesar 94,99% dengan TPT menunjukkan angka tertinggi sebesar 7,3%. indikator tingkat pembangunan daerah kabupaten Ketapang menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, begitu pula dengan angka belanja terhadap kemiskinan menunjukkan angka yang tidak tetap. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh belanja terhadap kemiskinan dapat di lihat pada gambar grafik di bawah ini:

Pengaruh belanja terhadap kemiskinan mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang terjadi pada tahun 2016-2020 Pemerintahan Kabupaten Ketapang. Pada tahun 2016 presentase belanja daerah Ketapang mencapai 94,34% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,72%, meningkat di tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Ketapang menjadi 95,94% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,52% lebih tinggi di banding tahun sebelumnya, berikutnya di tahun 2018 belanja daerah Kabupaten Ketapang sebesar 95,84% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,93%, kemudian di tahun 2019 semakin menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,86% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,54%, dan di tahun

2020 belanja daerah Kabupaten Ketapang menjadi 94,99% dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,29. Dari data diatas dapat disimpulkan belanja daerah dan tingkat kemiskinan setiap tahunnya tidak menunjukkan angka yang sama dikarenakan tingkat kemiskinan yang tinggi maka pengeluaran pemerintah daerah dalam mengatasi angka kemiskinan memerlukan dana dalam pelaksanaan kegiatan yang dialokasikan untuk mengatasi angka kemiskinan yang ada.

Realisasi penyerapan anggaran belanja merupakan indikator dalam evaluasi kinerja yang diadakan oleh pemerintah daerah. Berikut Persentase penyerapan anggaran belanja dalam lima tahun terakhir membentuk pola yaitu penyerapan anggaran yang masih rendah pada awal tahun sampai dengan triwulan ketiga kemudian diikuti dengan penyerapan anggaran yang menumpuk ditriwulan keempat. Diketahui bahwa realisasi penyerapan anggaran belanja Kabupaten Ketapang pada tahun 2016-2020 pada triwulan ke 4 setiap tahunnya menunjukkan angka tertinggi, di tahun 2016 pada triwulan ke 4 dengan realisasi sebesar 143,61%, memasuki tahun 2017 pada triwulan ke 4 persentase penyerapan anggaran belanja mengalami penurunan sebesar 129,51%, ditahun 108 pada triwulan ke 4 menunjukan angka yang semakin menurun dengan persentase sebesar 115,76%, menginjak tahun 2019 anggaran belanja mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 121,18% dan di tahun 2020 angka tersebut kembali meningkat dengan persentase sebesar 122,24%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja setiap triwulannya dan pada triwulan ke 4 mengalami fluktuasi serta penumpukan anggaran yang besar di triwulan ke 4 setiap tahunnya. Penumpukan penyerapan di Kabupaten Ketapang.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Ketapang

Pada dasarnya APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. APBD dapat menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah, baik dari segi pendapatan maupun belanja. Tabel berikut merupakan gambaran pertumbuhan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2016-2020. Menurut

hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Akuntansi di BPKAD Kabupaten Ketapang salah satu faktor penyebab serapan belanja menumpuk dakhir kwartal adalah masalah lelang yang sering dilakukan ditriwulan ketiga dan keempat dan ini hampir terjadi sepanjang tahun.

Tabel 3. Pertumbuhan APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Surplus/Defisit	Persentase surplus (%)
2016	1.897.853,56	1.951.143,20	-53.289,64	-0,028
2017	1.995.921,83	1.993.617,87	2.303,96	0,001
2018	2.168.545,57	2.118.372,56	50.173,01	0,023
2019	2.375.240,08	2.348.730,05	26.510,03	0,011
2020	2.259.813,90	2.144.283,04	115.530,87	0,051

Sumber data : BPKAD Kab. Ketapang (data diolah)

Dari tabel diatas dapat kita lihat pertumbuhan APBD Kabupaten Ketapang dari tahun 2016-2020, dari segi pendapatan daerah maupun dari segi belanja daerah keduanya sama-sama mengalami angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016 mengalami surplus atau defisit dikarenakan selisih angka antara pendapatan yang rendah dan belanja yang tinggi. Pada tahun 2017-2019 surplus atau defisit Kabupaten Ketapang menunjukkan turun naiknya pertumbuhan ekonomi dilihat dari segi belanja daerah dan untuk ditahun 2020 pendapatan turun dari tahun sebelumnya dan merupakan surplus yang tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena selisih angka antara pendapatan dan belanja yang cukup besar ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah terhadap belanja, serta wabah covid-19 sehingga perekonomian masyarakat ikut terganggu terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal daerah.

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang pada tahun 2016-2020 dari beberapa dana yang ada pada tahun 2016 dana bagi hasil pajak dikatakan kurang efektif dengan persentase 62,74% mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020 terakhir menjadi tidak efektif dengan pesentase 44,43, padahal di tahun 2018 persentase realisasi anggaran dan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 142,13% dengan kategori sangat efektif. Untuk dana bagi hasil sumberdaya alam dari tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang baik dengan persentase 100% setiap tahunnya dengan kategori sangat efektif, begitu pula dengan dana alokasi umum dari tahun 2016-2020 bisa dikatakan

sangat efektif dengan persentase 100% setiap tahun hanya pada tahun 2019 persentase mengalami penurunan menjadi 99,99%. Dan dana alokasi khusus di tahun 2016 dengan persentase 73,86% dengan kategori kurang efektif dan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 98,9% dengan kategori efektif.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan hanya dana bagi hasil yang mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan wabah pandemi, lapangan usaha atau lapangan pekerjaan menjadi sulit untuk dilaksanakan dan didapatkan berdampak terganggunya pengumpulan pajak yang di peroleh Kabupaten Ketapang. Permasalahan Covid-19 tidak hanya berhenti pada sektor ekonomi saja, jika di tinjau secara luas banyak sektor lainnya yang merasakan dampak tersebut seperti sektor Pendidikan dan sektor publik.

Evaluasi Output Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut Abdul Halim (2012). Anggaran memiliki peranan yang sangat strategis di dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 perihal Pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran berkenaan. Belanja wilayah dipergunakan buat mendanai aplikasi urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib serta urusan pemerintahan pilihan. Sesuai data realisasi belanja, dalam lima tahun terakhir, terjadi pertumbuhan belanja yang relatif menggembirakan di Kabupaten Ketapang.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2020. Data ditahun 2016 menunjukan Realisasi yang terendah dari dana yang direalisasikan sebesar 95,34% dengan kriteria efisien, realisasi pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dan penurunan secara perlahan setiap tahunnya di tahun 2017 realisasi yang dikeluarkan pemerintah Ketapang sebesar 95,94% dengan kategori Efisien, mengalami penurunan 10%

di tahun 2018 sebesar 95,84% dengan kategori efisien dalam realisasi Anggaran yang dikeluarkan Kabupaten Ketapang, memasuki tahun 2019 dan 2020 semakin menurun disebabkan adanya kebijakan pemerintah dan pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan realisasi semakin jauh di tahun 2019 akan tetapi kriteria efisiensi keuangan dalam kategori total belanja menunjukkan persentase realisasi sebesar 94,86% dan mengalami kenaikan persentase 13% di tahun 2020 menjadi 94,99%.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Paragraf 5, "informasi mengenai realisasi anggaran berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran", dengan cara: 1. Menyediakan informasi keuangan mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi, 2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hasil penelitian Tangdialla, & Datu (2021) meneliti "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja (BAPPEDA) Toraja Utara". Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah: Hasil analisis, efektivitas BAPPEDA Toraja Utara sudah baik. Meskipun menunjukkan hasil efektivitas yang fluktuatif dari tahun 2015-2019. Untuk meningkatkan maupun mempertahankan efektivitas yang telah efektif pada tahun 2019, diperlukan koordinasi dari semua pihak. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun perencanaan anggaran sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas yang baik.

Evaluasi Outcome Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang

Dalam mengatasi permasalahan dan persoalan yang terjadi Indonesia di khususnya Kabupaten Ketapang. Fenomena pandemi tidak lepas dari persoalan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Ketapang, usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut merangkul beberapa lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berperan besar dalam perbaikan perekonomian yang ada di Indonesia, Kabupaten Ketapang khususnya. Diharapkan kedepannya pemerintah bersama Bank Indonesia dan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong pemulihan ekonomi. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan dan memberikan relaksasi uang muka kredit kendaraan bermotor dan properti. OJK juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit perbankan dan memberikan relaksasi aset tertimbang menurut risiko (ATMR) kredit perumahan dan sektor kesehatan

Selama periode 2016-2020, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,85 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 3,74 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,65 persen untuk periode yang sama. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang sebesar 0,50 persen. Namun angka ini masih lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang berkontraksi sebesar 1,82 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkontraksi sebesar 2,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang pada periode tahun 2016-2020 tergolong tinggi, tetapi masih belum optimal jika dilihat dari trend grafik yang masih bersifat fluktuatif. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang terutama disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata pertumbuhan sektoral mencapai 15,85 persen. Nilai pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi di sektor pertambangan, khususnya pada sub sektor pertambangan bijih logam. Sektor informasi dan komunikasi juga menyumbang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ketapang dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,06 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan jaringan telepon dan internet.

SIMPULAN

Sesuai capaian output pelaksanaan APBD dalam capaian target perubahan RPJMD dalam periode 2016-2020, data realisasi belanja, dalam lima tahun terakhir, terjadi pertumbuhan belanja yang relatif membaik di Kabupaten Ketapang. Capaian outcome

pelaksanaan APBD yang didapatkan belum optimalnya pelaksanaan APBD dikarenakan TPAK Kabupaten Ketapang yang masih menunjukkan tren berfluktuatif dan cenderung menurun serta tingginya angka pengangguran di Kabupaten Ketapang menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi pelaksanaan APBD di Kabupaten Ketapang.

Temuan hasil evaluasi APBD dalam capaian target RPJMD Kabupaten Ketapang masih sangat besar ketergantungannya dengan pendapatan transfer dari Pemerintah pusat hal tersebut di karenakan APBD Kabupaten Ketapang dari segi belanja daerah masih tergolong rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2022). Statistik Indonesia 2022.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifa, L. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016-2020. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 7(4):640–51. doi: 10.35326/pencerah.v7i4.1571.
- Hrúza, F. (2015). "Public Sector Organization Financial Ratios" Recent Development as a Matter of Financial Innovation".
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Komang, A.A.S. (2019). Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Dari Waktu Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9(1):59–71.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Matondang, E.S. (2022). *Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja*. Medan-Sabtu.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. n.d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. n.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. n.d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. n.d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- RKPD Bappeda Kabupaten Ketapang Tahun 2021. n.d. RKPD Bappeda Tahun 2021.
- Tangdialla, R., dan R. Datu. (2021). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja BAPPEDA Toraja Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)* 2(1):117–34.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan .
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. n.d. “Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.”
- Undang-undang (UU) tentang Keuangan Negara. 2003. “Undang-Undang (UU) Tentang Keuangan Negara.”
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ”Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. n.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ”Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. n.d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.